

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU**

No	Daftar Informasi Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Pengecualian Informasi		Jangka Waktu Pengecualian	Tempat dan Tanggal Penetapan
			Dibuka	Ditutup		
INSPEKTORAT						
1	Data Identitas Pelapor E-Ngadu	UUKep.Men.PAN Nomor : KEP/118/M.PAN/8/2004	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	Menjaga keamana pelapor	Selama Berlaku	
2	Surat Rahasia	- UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i dan j	Mengganggu kebijakan Pemerintah /Pimpinan	Mendukung kebijakan Pemerintah /Pimpinan	Selama Berlaku	
3	Memorandum/surat-surat dan inter badan publik	- UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i dan j	Menghambat kebijakan Pemerintah Daerah	Memperlancar proses dan kebijakan Pemerintah	Selama Berlaku	
4	Disposisi surat pimpinan	- UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i dan j	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama Berlaku	
5	Dokumen hasil pengawasan melekat (waskat)	- Kemenpan. No. KEP/46/M.DAN/4/2004 tentang petugas pengelolaan pengawasan melekat dan pengawasan Pemerintah - UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h, i dan j	Mengganggu kebijakan lebih lanjut yang akan dilakukan	Kebijakan lebih lanjut akan lebih muda dilaksanakan	Selama Berlaku	
6	Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP) dan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP)	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i dan j	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan	Selama Berlaku	
7	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), termasuk LHP pemeriksaan kasus, LHP <i>review</i> laporan keuangan	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i dan j	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan	Selama Berlaku	

8	Dokumen tindaklanjut pemeriksaan	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i - Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasal 23 dan Pasal 26 - Standar AAIPi bab standar komunikasi Pasal 4060 tentang Pendistribusian Dokumen Audit	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	Membantu Badan Publik dalam menyusun kebijakan	Selama Berlaku	
9	Dokumen pemeriksaan dan <i>review</i>	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i - Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasal 23 dan Pasal 26 - Standar AAIPi bab standar komunikasi Pasal 4060 tentang Pendistribusian Dokumen Audit	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan	Selama Berlaku	

DINAS KESEHATAN						
1	DPA OPD DINKES Tahun 2021	Ka. Subbag PEP	UU No 14 Tahun 2008	Kesalahan dalam mengartikan isi atau kegiatan oleh orang yang tidak bertanggungjawab	2 Tahun	Bengkulu
2	DIPA Satker 01.03.04.05.07 dan 012 TA 2021	Ka. Subbag PEP. PPK Satker	UU No 14 Tahun 2008	Kesalahan dalam mengartikan isi atau kegiatan oleh orang yang tidak bertanggungjawab	2 Tahun	Bengkulu